



Katalog BPS : 9302008.3216

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BEKASI MENURUT PENGGUNAAN 2009 - 2011



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BEKASI

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BEKASI**

2009 – 2011

menurut Penggunaan

Nomor Katalog / *Catalogue Number* : 9302003.3216

Nomor Publikasi BPS / *BPS Publication Number* : 32160.1251

Ukuran Buku / *Book Size* : 21 cm x 30 cm

Jumlah Halaman / *Number of Pages* : iv + 34 halaman / *Pages*

Naskah / *Manuscript* : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting / *Editor* : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Grafik / *Graphic Design* : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit Muka / *Cover Design* : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penerbit / *Publisher* : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi

Dicetak oleh / *Printed by* : CV. Viartha Mediatama

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, buku “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten menurut Penggunaan Tahun 2012” dapat disajikan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi menurut Penggunaan merupakan salah satu sisi penyajian data perekonomian daerah yang dilihat dari penggunaannya atau pengeluaran. PDRB penggunaan yang disajikan terdiri atas komponen-komponen pengeluaran konsumsi (rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan stok, ekspor dan impor). Perhitungan komponen-komponen tersebut akan menghasilkan beberapa indikator ekonomi yang menjadi tolok ukur kinerja perekonomian makro Kabupaten Bekasi, diantaranya struktur/peranan masing-masing komponen terhadap total perekonomian Kabupaten Bekasi, laju pertumbuhan ekonomi (LPE), banyaknya investasi yang terbentuk dalam hal ini modal tetap (*fixed asset*) yang ditunjukkan oleh komponen PMTB.

Diharapkan Laporan Akhir ini mampu memenuhi dan memberikan informasi dan dapat sejalan dengan kerangka acuan kerja yang diinginkan serta dapat memberikan masukan untuk laporan berikutnya.

Demikian, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang nantinya akan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan kegiatan atau laporan ini dan berikutnya.

Bekasi, Oktober 2012
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi
Kepala,

Heri Gunawan, S.Si
NIP. 19661207 198901 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Ruang Lingkup	4
1.5. Sumber Data	4
1.6. Keluaran (output)	4
BAB 2. KONSEP DAN DEFINISI	5
2.1. Konsumsi Rumah Tangga	6
2.2. Konsumsi Lembaga Non Profit	9
2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11
2.5. Perubahan Stok	11
2.6. Ekspor dan Impor	12
BAB 3. METODOLOGI	14
BAB 4. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN KABUPATEN BEKASI DARI SISI PDRB PENGGUNAAN	15
4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17
4.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	20
4.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21
4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23
4.5. Perubahan Stok	25
4.6. Ekspor dan Impor	26

Daftar Tabel

	Hal
Tabel 4.1. Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi Atas Dasar Berlaku menurut Penggunaan Tahun 2009 – 2011 (Juta Rupiah)	16
Tabel 4.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bekasi Berdasarkan PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 – 2011 (Juta Rupiah)	18
Tabel 4.3. Peranan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Terhadap PDRB Kabupaten Bekasi Tahun 2009 – 2011 (Persen)	19
Tabel 4.4. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Terhadap PDRB Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 – 2011 (Juta Rupiah)	20
Tabel 4.5. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 – 2001 (Juta Rupiah)	22
Tabel 4.6. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 – 2011 (Juta Rupiah)	24
Tabel 4.7. Nilai Perubahan Stok PDRB Penggunaan Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 – 2011 (Juta Rupiah)	25
Tabel 4.8. Nilai Ekspor Kabupaten Bekasi Tahun 2009 – 2011 (Juta Rupiah)	26

Daftar Gambar

	Hal
Gambar 4.1. Peranan Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bekasi, 2011	17
Gambar 4.2. Nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bekasi, 2009 – 2011	18
Gambar 4.3. Nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten Bekasi, 2009 – 2011	23
Gambar 4.4. Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Bekasi, 2009 – 2011	25
Gambar 4.5. Nilai Ekspor Kabupaten Bekasi, 2009 – 2011	26

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk Kabupaten Bekasi Hasil Sensus Penduduk Tahun 2011 mencapai 2.764.516 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 2.170 km². Potensi penduduk yang cukup besar ini menunjukkan adanya peluang untuk lebih menggerakkan pembangunan ekonomi yang cepat dengan memberikan kemudahan berinvestasi bagi pelaku usaha.

Sebagai daerah yang berbatasan dengan ibukota negara, pembangunan ekonomi di Kabupaten Bekasi selama 20 tahun terakhir merubah dari daerah agraris menjadi pusat industri pengolahan (*manufacturing*) yang berskala asing dan nasional. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri yang mendominasi output ekonomi (PDRB) Kabupaten Bekasi mencapai 80 persen, sehingga menjadikan PDRB Kabupaten Bekasi tertinggi di Jawa Barat dan 10 besar dibandingkan dengan PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh karena itu berbagai potensi yang dimiliki serta dinamika pembangunan ekonomi di Kabupaten Bekasi sedikit banyak dan secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pembangunan ekonomi nasional.

Faktor internal dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi diantaranya berupa kemampuan wilayah dalam menggerakkan sektor andalan atau sektor ikutan, kepercayaan dan kestabilan sektor keuangan, pembiayaan pemerintah daerah dalam menopang kegiatan perekonomian melalui APBD, serta kondisi sosial politik. Sementara faktor eksternal banyak dipengaruhi kondisi ekonomi nasional maupun dunia seperti krisis global yang terjadi ditahun 2009 yang memukul sektor industri sehingga angka pertumbuhan ekonomi pada saat itu melambat dibandingkan tahun 2008. Oleh karena itu untuk menggerakkan pembangunan ekonomi yang stabil, faktor investasi/pembentukan modal yang terjaga dan berkelanjutan sangat diperlukan dan secara langsung dapat memberi efek terhadap pertumbuhan ekonomi.

Orientasi pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berupaya meningkatkan pendapatan perkapita menjadi tolok ukur kemajuan suatu wilayah. Sehingga upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menarik investor yang banyak menyerap tenaga kerja yaitu salah satunya dengan investasi yang mengarah pada pengembangan industri pengolahan.

Permasalahan yang timbul dalam pembentukan modal/investasi adalah ketersediaan sektor keuangan/perbankan yang terbatas dalam mendanai investasi yang banyak menyerap tenaga kerja oleh karena itu untuk dapat memenuhinya berbagai upaya dapat dilakukan baik berupa pinjaman luar negeri, undangan para investor maupun permintaan bantuan lembaga-lembaga donor serta peranan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan baik kebijakan administrasi daerah maupun sarana dan prasarana fisik di daerah yang memadai.

Keberhasilan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara cepat, ternyata tidak dibarengi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan distribusi pembangunan, hal ini dikarenakan pembangunan yang pesat hanya digerakan oleh pembangunan fisik dan pembangunan industri manufaktur berteknologi tinggi (padat modal), sementara dari sisi sumber daya manusia (SDM) belum siap untuk menyerap hal tersebut. Oleh karena itu pembangunan ekonomi diharapkan mengarah pada penguatan/fundamental ekonomi dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, meningkatkan investasi yang menyerap tenaga kerja banyak serta berbahan baku lokal tinggi, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).

Perkembangan kemajuan ekonomi tersebut perlu dikaji dan diukur keberhasilannya baik dari sisi produksi maupun dari sisi permintaan/penggunaan akhir artinya nilai ekonomi yang ada di suatu wilayah dari sisi penggunaan dimanfaatkan untuk komponen apa saja. Secara teori komponen penggunaan akhir dari suatu kegiatan ekonomi diantaranya meliputi : konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit, konsumsi pemerintah (APBD), pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi seluruh sektor, perubahan inventori/stok serta ekspor-impor. Melalui pendekatan ini akan diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatannya, selain itu dapat diketahui besar ketergantungan ekonomi domestik (wilayah) terhadap wilayah lain dalam bentuk perdagangan barang dan jasa (transaksi eksternal).

1.2. Maksud dan Tujuan

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja serta diharapkan dapat mencapai target-target seperti yang telah ditetapkan baik untuk regional atau nasional. Untuk mengukur kinerja perkembangan ekonomi di suatu

wilayah dapat diamati melalui pertumbuhan ekonomi makro, struktur perekonomian, pendapatan perkapita dan indikator ekonomi lainnya. Di samping itu, data statistik dan indikator ekonomi dapat digunakan untuk menganalisis dan menentukan arah kebijaksanaan serta mengevaluasi hasil pembangunan. Salah satu indikator ekonomi yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kabupaten Bekasi mempunyai potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang besar serta cita-cita yang tinggi seperti tertuang dalam visi dan misinya. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran atas kinerja dari strategi-strategi yang dilakukan sesuai dengan garis-garis haluan yang telah ditetapkan. Publikasi PDRB Penggunaan Kabupaten Bekasi merupakan potret dari kinerja pembangunan ekonomi makro Kabupaten Bekasi dilihat dari sisi besaran Konsumsi, Investasi dan Ekspor-Impor, kontribusinya terhadap perekonomian regional dan laju pertumbuhannya. Diharapkan informasi ini bisa menjadi bahan evaluasi dan menjadi pijakan kuat untuk alat perencanaan bagi Pemerintah Daerah, selebihnya diharapkan bisa menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi masyarakat pengguna data lainnya.

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1998 tentang Kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (lembaran Negara RI tahun 1988 nomor 10 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3373).
2. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 140 tambahan lembaran Negara RI nomor 4578).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Bekasi nomor 1 tahun 2007).
4. Undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Statistik.
6. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Penggunaan Kabupaten Bekasi sebagai berikut :

1. Cakupan waktu penelitian data yang digunakan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.
2. Cakupan wilayah penelitian yaitu Kabupaten Bekasi.
3. Cakupan materi adalah data-data PDRB yang disusun berdasarkan penggunaan.

1.5. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan buku PDRB Kabupaten Bekasi adalah data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data tersebut dilakukan melalui kegiatan/survei yang terbagi dalam 3 kegiatan/kuesioner antara lain :

- 1.5.1. **Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKNLP)**, yaitu kegiatan/survei yang dilakukan untuk melihat nilai tambah ekonomi usaha (omset), tenaga kerja, Pendapatan Modal Tetap Bruto (PMTB) serta rasio biaya antara yang terbagi menjadi 9 sektor.
- 1.5.2. **Survei Keuangan Daerah (SKD)**, yaitu kegiatan/survei untuk melihat dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan ekonomi yang mempengaruhi produksi pada sektor pertanian, serta dampaknya pada masyarakat yang meliputi sektor penggalian/pertambangan, industri, listrik, air dan gas, bangunan/konstruksi gedung, perdagangan hotel dan restaurant/rumah makan, angkutan, komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa-jasa.
- 1.5.3. **Survei Data Sekunder (SDS)**, yaitu kegiatan/survei pengumpulan data pada dinas instansi/usaha yang terbagi dalam 9 sektor serta data sekunder PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

1.6. Keluaran (*Output*)

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Penyusunan buku PDRB menurut penggunaan didapatkan informasi mengenai nilai PDRB yang terbentuk dari sisi penggunaan/pengeluaran di Kabupaten Bekasi yang dapat dijadikan sebagai acuan/pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, strategi dan arah pembangunan di Kabupaten Bekasi.
2. Data Hasil Survei/kegiatan.
3. Media dokumentasi dibuat dalam bentuk hard copy (buku) maupun *soft copy*.

BAB 2

KONSEP DAN DEFINISI

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut penggunaan menggambarkan penggunaan barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai sektor dalam masyarakat. Penggunaan PDRB tersebut secara garis besar ada dua macam yaitu : Konsumsi Antara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi dan Konsumsi Akhir untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Untuk melihat hubungan antara pendapatan dan permintaan terhadap barang dan jasa dapat ditulis sebagai berikut :

“PDRB SAMA DENGAN NILAI SELURUH PENGELUARAN AKHIR DIKURANGI DENGAN NILAI TOTAL IMPOR”

Pengeluaran akhir merupakan pembelian dari semua barang dan jasa (barang konsumsi, output pemerintah dan lembaga swasta non profit, barang modal, perubahan persediaan, semua barang yang diekspor) yang disuplai dalam suatu perekonomian. Nilainya akan melebihi dari output yang diproduksi oleh sektor-sektor produksi domestik sebesar nilai impor barang dan jasa. Nilai produksi domestik akan diperoleh dari selisih pengeluaran akhir dengan total impor, yang persamaannya dapat ditulis :

$$Y = C_h + C_n + C_g + I_i + I_s + X - M \quad (1)$$

dimana:

C_h : Konsumsi Rumah Tangga (*Household*)

C_n : Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit (*Non Profit Institution*)

C_g : Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan (*Government*)

I_i : Pembentukan Modal Tetap Bruto (*Investment*)

I_s : Perubahan Stok (*Capital Stock*)

X : Ekspor

M : Impor

Y : PDRB

Dari persamaan (1) dapat disederhanakan menjadi:

$$Y = C + I + X - M \quad (2)$$

di mana:

C : Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Non Profit Rumah Tangga(LNPR), Pemerin-

tah dan Pertahanan

I : Investasi

X : Ekspor

M : Impor

Y : PDRB

2.1. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dikurangi dengan hasil penjualan neto dari barang bekas atau apkiran. Pengeluaran tersebut termasuk pembelian aktiva berwujud yang tidak dapat diproduksi kembali (kecuali tanah) seperti hasil karya seni, barang-barang koleksi dan barang antik. Termasuk juga pembelian barang tahan lama seperti meubeler, sepeda motor, mobil dan barang elektronik (komputer, TV, radio) dan imputasi sewa rumah sendiri. Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga meliputi nilai barang dan jasa yang dihasilkan untuk konsumsi sendiri seperti hasil kebun, peternakan, kayu bakar dan biaya hidup lainnya serta barang-barang dan jasa.

Disamping itu pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya termasuk dalam konsumsi rumah tangga. Pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening air, listrik, telepon dan lain-lain merupakan konsumsi rumah tangga.

Penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dilakukan dengan:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga di pasar suatu daerah adalah pembelian langsung di pasar tersebut baik oleh penduduk maupun rumah tangga bukan penduduk daerah tersebut (staf kedutaan asing dan turis domestik maupun asing).
- 2) Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi butir satu di atas, ditambah pembelian langsung penduduk daerah ini yang dilakukan di luar negeri atau daerah lain, dikurangi pembelian langsung di pasar domestik oleh rumah tangga di luar penduduk daerah tersebut (staf kedutaan asing dan turis domestik maupun asing).

Dalam kasus batas, pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh penduduk yang sedang melakukan perjalanan ke daerah lain (dalam atau luar negeri) baik dalam rangka bertugas, urusan bisnis atau untuk keperluan lainnya sudah terhitung di rumah tangga yaitu melalui konsumsi perkapita.

Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kabupaten Bekasi. Dari hasil Susenas diperoleh data rata-rata konsumsi perkapita seminggu untuk kelompok makanan dan rata-rata konsumsi perkapita sebulan untuk kelompok BUKAN MAKANAN. Harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi menggunakan rata-rata harga eceran dari Statistik Harga Konsumen Kabupaten Bekasi, disamping itu digunakan data lainnya seperti PDRB perkapita atas dasar harga konstan, Indeks Harga Konsumen (IHK) dan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pengeluaran konsumsi kelompok makanan terdiri dari pengeluaran untuk :

- 1) Makanan, yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan dan udang segar dan sejenisnya, ikan dan udang yang diawetkan dan sejenisnya, daging segar, daging yang diawetkan, hasil ikutan daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, bahan minuman, bumbu-bumbuan dan konsumsi bahan makanan lainnya.
- 2) Makanan dan minuman jadi.
- 3) Tembakau dan sirih, yang meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu dan tembakau.

Pengeluaran untuk kelompok bukan makanan terdiri dari pengeluaran untuk :

- a) Perumahan, bahan bakar, air dan penerangan.
- b) Aneka barang dan jasa.
- c) Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
- d) Pajak dan asuransi.
- e) Keperluan untuk pesta dan upacara.

Total pengeluaran konsumsi rumah tangga keseluruhan diperoleh dari pengeluaran perkapita setahun dikalikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkiraan pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk tahun-tahun yang tidak ada data Susenasnya dihitung berdasarkan elastisitas pendapatan dari Susenas yang ada.

a. Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan

Perkiraan konsumsi kelompok makanan digunakan model *fungsi eksponensial*. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi, tetapi pada suatu saat (titik jenuh) konsumsi tersebut mulai menurun, dengan bentuk kurva seperti parabola.

Fungsi eksponensial tersebut adalah:

$$Q_i = a \cdot Y_i^b$$

di mana:

Q_i : Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (kuantum)

Y_i : Pendapatan perkapita sebulan

a : Konstanta

b : Koefisien elastisitas

Koefisien elastisitas (b) yang telah diuji digunakan untuk memperkirakan konsumsi perkapita pada tahun yang tidak ada data Susenasnya. Konsumsi perkapita tahun lainnya dapat diperkirakan dengan menggunakan peubah lain yaitu perubahan pendapatan perkapita (atas dasar harga konstan), dan data konsumsi perkapita (Susenas) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$C_{n+1} = C_n + (C_n - dp - b)$$

dimana :

C_{n+1} : Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun ke-($n+1$)

C_n : Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun dasar ke-(n)

dp : Perubahan pendapatan perkapita harga konstan tahun ke- n dengan tahun ke-($n+1$)

b : Koefisien elastisitas

Nilai konsumsi atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan konsumsi dalam satuan kuantum dengan harga eceran pada tahun yang bersangkutan. Harga konsumen atau harga eceran merupakan harga yang dibayar oleh rumah tangga konsumen yang tujuannya untuk dikonsumsi. Harga tersebut merupakan rata-rata harga eceran di kota dan harga di pedesaan.

Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan didapatkan dengan metoda *revaluasi* artinya konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga tahun dasar.

b. Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Bukan Makanan

Perkiraan konsumsi rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menggunakan model *regresi linier*. Artinya setiap kenaikan pendapatan akan selalu diikuti oleh penambahan permintaan konsumsi kelompok bukan makanan misalnya permintaan akan pakaian, dan lain sebagainya. Model yang digunakan sebagai berikut:

$$Q_i = a + b \cdot Y_i$$

dimana:

Q_i : Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (kuantum)

Y_i : Pendapatan perkapita sebulan

a : Konstanta

b : Koefisien elastisitas

Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan pada tahun-tahun dimana data Susenas tersedia, diperoleh dengan cara *mendeflasi* nilai konsumsi (nilai data Susenas) dengan IHK yang sesuai dengan jenis pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi.

Pada tahun-tahun dimana data Susenas tidak tersedia maka nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku diperoleh dengan metode model regresi linier yang menghasilkan koefisien elastisitas permintaan yang dikalikan dengan pendapatan, kemudian mengalikannya dengan IHK.

2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah lembaga formal maupun informal yang dibentuk atau dibiayai oleh perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka menyediakan jasa pelayanan yang bersifat non komersial khususnya bagi anggota masyarakat umum tanpa adanya motivasi untuk meraih keuntungan.

Bentuk LNP yang melayani rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Kemasyarakatan,
2. Organisasi Sosial,
3. Organisasi Profesi,
4. Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olah raga dan Hobi,
5. Lembaga Swadaya Masyarakat,
6. Lembaga Keagamaan,
7. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa.

Penyusunan perkiraan konsumsi LNPRT dilakukan dengan menggunakan metode langsung dari hasil survei khusus yaitu diperoleh dari penjumlahan output sub sektor jasa sosial dan kemasyarakatan dikurangi surplus usahanya.

Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 sesuai dengan kegiatan masing-masing subsektornya, seperti penghitungan menurut lapangan usaha yaitu metode *deflasi* dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sesuai dengan

masing-masing kegiatan, atau *ekstrapolasi* dengan menggunakan indeks jumlah unit kegiatan atau indeks jumlah tenaga kerja.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai nilai output atas pelayanan pemerintah dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit yang kegiatannya yang tidak dapat dipisahkan. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sama dengan nilai barang dan jasa yang digunakan oleh pemerintah untuk konsumsinya pada saat itu.

Output pemerintah tidak dijual sehingga nilainya diukur dengan biaya produksinya, yaitu jumlah konsumsi antara, konsumsi pegawai, konsumsi modal tetap dan pajak tak langsung. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini mencakup pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Nilai barang dan jasa yang dikonsumsi sendiri oleh pemerintah tidak dapat diperoleh secara langsung karena produksi sektor ini tidak dijual. Oleh karena itu untuk memperoleh nilainya diperkirakan dari besarnya biaya produksi yang dikeluarkan.

Penghitungan konsumsi pemerintah menggunakan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa yang diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3. Laporan keuangan tersebut meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pensiun dan subsidi, belanja pemeliharaan barang, belanja perjalanan dinas dan belanja rutin lainnya.

Selain itu digunakan juga Neraca Produksi Pemerintah Pusat dan Pertahanan Keamanan (atas dasar harga berlaku) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), data jumlah pegawai negeri sipil pusat dan daerah serta Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

Pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja pembangunan atas dasar harga berlaku diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3.

Untuk memperkirakan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dilakukan pendekatan sebagai berikut:

- 1) *Ekstrapolasi* belanja pegawai dengan indeks jumlah pegawai.
- 2) *Deflasi* belanja barang dengan IHPB tanpa ekspor tahun yang sesuai.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meliputi seluruh pengeluaran untuk unit produksi yang menambah daya produksi aktiva tetap dikurangi dengan penjualan dari barang-barang modal bekas ditambah penjualan barang-barang lain yang berasal dari daerah atau negara lain.

Secara rinci, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terdiri dari:

- a) Penambahan bersih (baru atau bekas) oleh produsen, asset berwujud yang dapat diproduksi kembali yang mempunyai umur satu tahun atau lebih dan digunakan bukan untuk keperluan militer.
- b) Pengeluaran atas peningkatan dan perubahan barang-barang modal yang diharapkan memperpanjang umur barang tersebut atau dapat meningkatkan produktivitasnya.
- c) Pengeluaran atas reklamasi tanah dan perbaikannya, pengembangan dan perluasan perkebunan, pertambangan, hutan, lahan pertanian dan perikanan.
- d) Penambahan ternak yang dipelihara untuk diambil tenaga, susu, bulu dan pembibitan ternak potong.

Pembentukan Modal Tetap Bruto dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing lapangan usaha. Disamping itu, pembentukan modal dapat juga dihitung berdasarkan arus barang atau *Commodity Flow*.

Pembentukan modal tetap menurut lapangan usaha mencakup sembilan sektor, yaitu:

- 1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan,
- 2) Pertambangan dan Penggalian,
- 3) Industri Pengolahan,
- 4) Listrik, Gas dan Air Bersih,
- 5) Bangunan,
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran,
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi,
- 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,
- 9) Jasa-jasa.

2.5. Perubahan Stok

Data mengenai nilai perubahan stok dalam komponen PDRB masih merupakan

perkiraan kasar, karena dihitung dari selisih PDRB dengan komponen permintaan akhir lainnya seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor neto. Dengan demikian, didalamnya masih terkandung selisih statistik (*Statistical Discrepancy*) yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

2.6. Ekspor dan Impor

Ekspor barang dan jasa merupakan suatu komponen dari permintaan akhir, tetapi impor merupakan sumber penyediaan barang dan jasa, oleh karena impor bukan merupakan produksi domestik jadi harus dikurangkan dari total penggunaan dalam PDRB.

Ekspor dan impor barang dan jasa meliputi angkutan dan komunikasi, jasa asuransi serta barang dan jasa lain seperti jasa perdagangan yang diterima pedagang suatu daerah karena mengadakan transaksi penjualan di luar daerah dan pembayaran biaya kantor pusat perusahaan induk oleh cabang dan anak perusahaan di luar daerah.

Pembelian langsung di pasar suatu daerah oleh bukan penduduk termasuk ekspor barang dan jasa, serta pembelian di luar daerah oleh penduduk daerah tersebut dikategorikan sebagai impor. Pengeluaran untuk biaya perjalanan yang dibayar oleh majikan diperlakukan sebagai ekspor dan impor barang dagangan dan bukan sebagai pembelian langsung.

Yang tidak termasuk ekspor dan impor barang adalah barang milik penduduk atau bukan penduduk suatu daerah yang melintasi batas geografis suatu daerah karena merupakan tempat persinggahan, barang untuk peragaan, barang contoh dan barang untuk keperluan sehari-hari wisatawan mancanegara/domestik.

Ekspor barang antar negara dinilai dengan harga *f.o.b.* (*free on board*), sedangkan impor barang dinilai dengan harga *c.i.f.* (*cost, insurance and freight*). Ekspor jasa dinilai pada saat jasa tersebut diberikan ke bukan penduduk, sedangkan impor jasa dinilai pada saat jasa diterima oleh penduduk.

Penduduk yang dimaksud di sini adalah lembaga pemerintah, perorangan, perusahaan swasta, perusahaan negara serta lembaga swasta non profit yang berada di daerah tersebut.

Data ekspor dan impor masih sangat terbatas. Data yang dapat diperoleh hanya transaksi dengan luar negeri. Data transaksi dengan luar negeri diperoleh dari Statistik

Ekspor Impor terbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Data ekspor impor antar pulau/provinsi diperoleh dari Statistik Bongkar Muat, Terminal Bis, Angkasa Pura melalui Dinas Bea dan Cukai.

Data lain yang diperlukan adalah IHPB untuk ekspor dan impor yang diperoleh dari Buletin Ringkas terbitan BPS dan juga data Input-Output Jawa Barat.

Nilai ekspor dan impor yang diperoleh dari transaksi barang dan jasa dengan luar negeri dan antar pulau/provinsi merupakan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku.

Ekspor dan impor antar negara merupakan ekspor impor antar negara menurut pelabuhan di Jawa Barat, sedangkan ekspor impor antar pulau/provinsi menggunakan ratio Input-Output. Nilai ekspor impor atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara menfokuskan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku dengan IHPB untuk ekspor dan impor.

BAB 3

METODOLOGI

Kegiatan persiapan dilakukan dengan mengadakan briefing dan rapat petugas serta pelatihan petugas survei dalam rangka pengumpulan data, pengawasan/pemeriksaan, editing/coding, entry data dan pengolahan data serta analisis data.

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung oleh petugas yang telah dilatih dengan menggunakan kuesioner yang telah dirancang sesuai dengan responden perusahaan atau kegiatan usaha di setiap kecamatan, adapun kuesioner yang digunakan adalah Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKNLP), serta survei lainnya seperti Survei Indikator Ekonomi dan Sosial.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dengan cara memberikan format isian yang harus diisi oleh Dinas/Instansi/Lembaga terkait. Adapun jenis kuesioner yang digunakan adalah Survei Data Sekunder (SDS), Survei Keuangan Daerah (SKD).

c. Pengolahan Data

Data hasil lapangan dan dari berbagai Dinas/Instansi (sekunder) serta data yang telah diperiksa, kemudian dilakukan proses editing coding serta diolah dengan menggunakan program pengolahan komputer (entry data). Pengolahan data primer akan menghasilkan nilai tambah dari sisi penggunaan seperti nilai konsumsi rumahtangga, lembaga non profit dan pemerintahan.

BAB 4

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN KABUPATEN BEKASI DARI SISI PDRB PENGUNAAN

Seiring dengan kondisi perekonomian nasional, pergerakan ekonomi Kabupaten Bekasi yang diukur dengan beberapa indikator ekonomi masih memberikan harapan besar terhadap peluang berinvestasi maupun memberikan dampak nilai tambah ekonomi terhadap masyarakat. Walaupun pertumbuhan tahun 2009 tidak setinggi tahun 2008. Namun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi selama 5 tahun terakhir (2006-2011) memperlihatkan pertumbuhan diatas rata-rata nasional yaitu masih tumbuh 6 persen pertahun, dan ditahun 2011 mencapai 6,26 persen.

Faktor eksternal (krisis global) pada kondisi ditahun 2009 agaknya cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ditahun 2009 telah terlewati. Dan ditahun 2011 memberikan gambaran ekonomi yang sangat baik, sebagai daerah yang berbasis industri, dengan kontribusi industri yang mencapai hampir 80 persen, masih berharap pada sektor ini agar tetap eksis.

Dari sisi permintaan komponen utama yang membentuk nilai tambah PDRB penggunaan, diperkirakan pendapatan modal tetap bruto (pmtb) memiliki kontribusi tertinggi. Hal ini disebabkan sebagai daerah industri memperlihatkan pengadaan investasi terutama mesin dan peralatannya serta investasi konstruksi/bangunan-bangunan industri dan lainnya pada sektor ini sangat besar sehingga komponen ini diperkirakan sangat mendominasi dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Kabupaten Bekasi sampai tahun 2011 masih mendominasi (tinggi) dibandingkan 26 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, kontribusi terhadap Provinsi Jawa Barat mencapai 30 persen. Sebagai daerah industri, struktur ekonomi sektor industri (PDRB) menguasai sebesar 76,37 persen. Dominasi kekuatan ekonomi Kabupaten Bekasi di tingkat Jawa Barat bahkan nasional sangatlah dimaklumi karena Kabupaten Bekasi sebagai tempat berinvestasi perusahaan berskala nasional dan asing bahkan di beberapa wilayah masuk dalam zona ekonomi eksklusif.

Memiliki jumlah penduduk yang besar (tahun 2011 2,7 juta), nilai konsumsi rumah tangga Kabupaten Bekasi juga memberikan andil konsumsi rumah tangga yang juga tinggi. Kenaikan konsumsi rumah tangga ini diperkirakan sejalan dengan inflasi yang terjadi berkisar 7 hingga 10 persen pertahun. Sementara konsumsi pemerintahan

juga selalu mengalami peningkatan hal ini tercermin meningkatnya belanja modal pemerintah daerah. Peningkatan ini juga terlihat dari makin meningkatnya nilai APBD Kabupaten Bekasi dari 1,7 triliun di tahun 2010 menjadi 2,4 triliun di tahun 2011. Dari sisi lembaga-lembaga sosial (*non profit*) tidak mengalami kenaikan yang berarti. Tabel 4.1. disajikan PDRB menurut penggunaan ADHB.

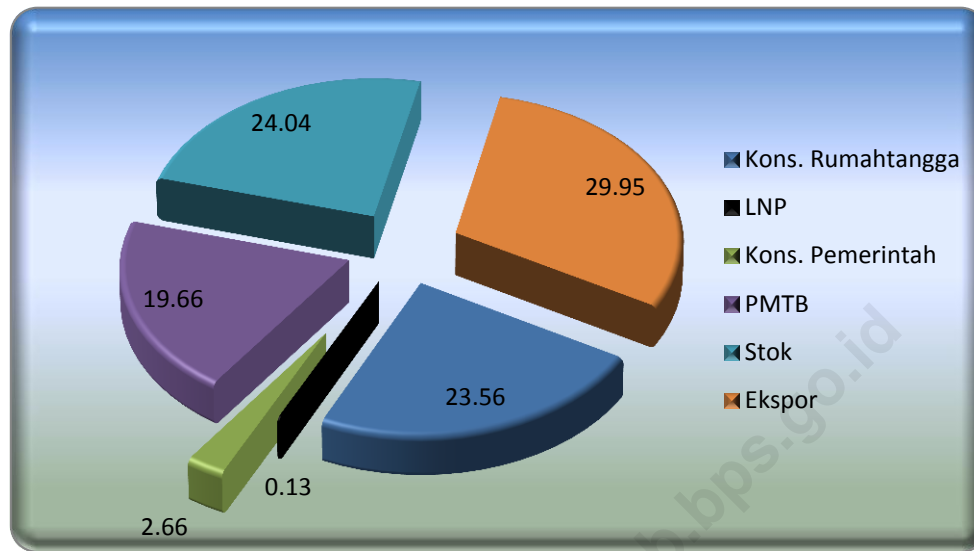
Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan, 2009 – 2011 (Juta Rupiah)

Komponen	2009	2010*)	2011**)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	21.093.749,92	23.009.504,67	25.160.584,68
- Makanan	12.211.956,53	13.364.765,23	14.595.920,35
- Non Makanan	8.881.793,39	9.644.739,44	10.564.664,33
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	116.651,61	127.675,19	139.780,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.586.787,93	2.634.908,42	2.836.866,02
a. Belanja barang	1.027.429,22	1.031.651,76	1.129.463,25
b. Belanja pegawai + penyusutan (NTB)	1.206.760,83	1.308.044,55	1.384.201,43
c. Penerimaan Barang dan jasa	352.597,88	295.212,11	323.201,34
4. Pembentukan Modal tetap Bruto	17.961.570,12	18.744.029,67	20.989.415,95
5. Perubahan Stok	21.108.412,57	23.805.436,06	25.672.512,46
6. Ekspor Netto	26.868.620,64	29.205.168,29	31.974.126,84
PDRB	89.735.792,80	97.526.722,30	106.773.286,09

**.) Angka sangat sementara

Dari sisi penggunaan Terlihat bahwa kekuatan ekonomi Kabupaten Bekasi sangat ditopang oleh sektor swasta ini terlihat dari nilai pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor yakni menguasai lebih dari 70 persen nilai PDRB.

Gambar 4.1. Peranan Komponen Pengeluaran terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bekasi, 2011



Selanjutnya secara komponen akan diuraikan nilai PDRB Kabupaten Bekasi dilihat dari sisi pengeluaran/penggunaan

4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumahtangga merupakan barometer kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Peningkatan konsumsi dan perubahan proporsi pola konsumsi dari makanan menuju non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan pendapatan, dan daya beli yang akhirnya dapat dijadikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara teoritis peningkatan konsumsi rumahtangga dipacu oleh penambahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi mutlak bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Peningkatan permintaan atau konsumsi merupakan pangsa pasar yang dapat mengerakan roda perekonomian yang lebih cepat pada sektor-sektor usaha yang memenuhi permintaan tersebut. Tabel 4.2. disajikan pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan data sumber awal dari survei sosial ekonomi nasional.

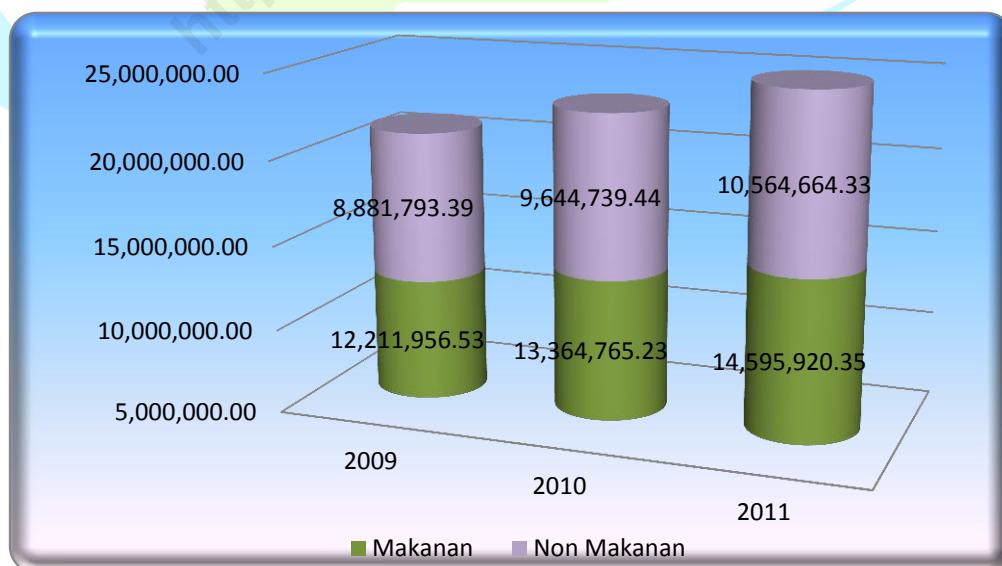
Tabel 4.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bekasi Berdasarkan PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 – 2011 (Juta Rupiah)

Komponen	2009	2010*)	2011**)	%
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	21.093.749,92	23.009.504,67	25.160.584,68	9,35
- Makanan	12.211.956,53	13.364.765,23	14.595.920,35	9,21
- Non Makanan	8.881.793,39	9.644.739,44	10.564.664,33	9,54
PDRB	89.735.792,80	97.526.722,30	106.773.286,09	9,48

***) sangat sementara

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama PDRB Penggunaan. Berdasarkan PDRB dari sisi permintaan atau PDRB atas dasar berlaku Kabupaten Bekasi tahun 2009 - 2011 terlihat adanya peningkatan dari Rp. 23,00 triliun menjadi Rp. 25,16 triliun atau ada kenaikan sebesar 9,35 persen dibandingkan tahun 2010. Komponen ini memiliki kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Bekasi sebesar 23,56 persen. Konsumsi rumahtangga ini dipengaruhi oleh tingkat harga (inflasi), banyaknya penduduk serta pendapatan rumahtangga.

Gambar 4.2. Nilai Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bekasi, 2009 – 2011



Dengan jumlah penduduk sebesar 2,68 juta jiwa serta pertumbuhan ekonomi ditahun 2011 yang mencapai 6,26 persen. Menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai

pangsa pasar yang menarik. Peningkatan jumlah konsumsi rumahtangga dan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi seharusnya dapat menggerakkan roda perekonomian di wilayah Kabupaten Bekasi, namun ini juga tergantung dari barang yang dikonsumsi penduduk apakah berasal dari produk lokal ataukah dari impor.

Bila dilihat dari pembentukannya komponen konsumsi rumahtangga dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu konsumsi makanan dan konsumsi non makanan. Konsumsi rumahtangga merupakan total penjumlahan dari seluruh konsumsi masyarakat disuatu wilayah, jika dibagi dengan jumlah penduduk akan merupakan konsumsi rata-rata perkapita.

Konsumsi makanan masih menunjukkan peran dominan dibandingkan dengan non makanan namun kecenderungan kontribusinya yang cenderung menurun dari tahun keahun seperti pada tahun 2011 menjadi 13,67 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar 13,70 persen. Sementara non makanan tidak mengalami perubahan dari tahun 2010.

Secara ekonomi kegiatan ini akan meningkatkan roda perekonomian dengan berbagai kemudahan tersebut masyarakat dipacu unutu meningkatkan konsumsi rumahtangganya, akan tetapi dilihat dari segi pemanfaatan oleh rumahtangga belum tentu barang-barang yang dibeli akan menjadi penggerak ekonomi rumah tangga. Bila penggunaan barang yang didapat dengan mudah ini menjadi alat peningkatan ekonomi rumahtangga maka dari dampak tersebut akan menghidupkan kekuatan dalam meningkatkan pendapatan bahkan dapat menggerakkan roda perekonomian yang pesat. Tabel 4.3. disajikan kontribusi pengeluaran rumah tangga terhadap total nilai PDRB Kabupaten Bekasi Tahun 2009-2011.

Tabel 4.3. Peranan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku terhadap PDRB Kabupaten Bekasi, 2009 – 2011 (Persen)

Komponen	2009	2010*)	2011**)
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	23,51	23,59	23,56
Makanan	13,61	13,70	13,67
Non Makanan	9,90	9,89	9,89

4.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit

Pengertian lembaga non profit secara umum adalah setiap lembaga nirlaba yang independen dan tidak terpengaruh oleh institusi pemerintah. Secara khusus Bank Dunia mendefinisikan *non government organization* atau diterjemahkan sebagai organisasi swasta yang pada umumnya bergerak dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan, mengangkat dan menyuarakan berbagai kepentingan orang miskin atau pihak yang terpinggirkan, memberikan pelayanan sosial dasar, atau melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada umumnya lembaga ini selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah, lembaga donor serta perorangan. Namun pada perkembangannya belum mampu mendongkrak perkembangan ekonomi secara agregat jika dibandingkan dengan komponen-komponan lain dari PDRB.

Kontribusi lembaga non profit di Kabupaten Bekasi masih sangat kecil hanya sekitar 0,13 persen. seperti disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit terhadap PDRB Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 – 2011 (Juta Rupiah)

Komponen	2009	2010*)	2011**)
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	116.651,61	127.675,19	139.780,15
Distribusi terhadap PDRB (%)	0,13	0,13	0,13
PDRB	89.735.792,80	97.526.722,30	106.773.286,09

Peran lembaga non profit lebih banyak berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dibiayai pemerintah maupun perorangan maka dapat diasumsikan bahwa peran komponen ini masih stagnan, tampaknya pemerintah belum optimal untuk membantu dalam pelayanan masyarakat atau lembaga-lembaga non profit belum dapat menunjukkan kinerja yang baik. Dengan prediksi bahwa lembaga non profit ini belum dapat bekerja dengan optimal maka pengaliran dana untuk pelayanan masyarakat kadang masih bersifat langsung.

Nilai konsumsi lembaga non profit pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp. 139,78 milyar mengalami kenaikan sebesar 9,48 persen dibandingkan tahun 2010, dengan kontribusi terhadap total PDRB hanya sebesar 0,13 persen.

Diharapkan peran pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kinerja lembaga non profit lebih pro aktif baik dari sumber dana maupun sumberdaya manusianya sehingga dapat meningkatkan kontribusi pada komponen ini dan tumbuh lebih cepat yang pada akhirnya memberikan andil kemajuan ekonomi suatu wilayah.

4.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah meliputi konsumsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meliputi seluruh instansi Negara, yang ada didaerah. Sedangkan pemerintah daerah meliputi pemerintah provinsi, Kabupaten dan pemerintah desa beserta perangkat dinasny dimasing-masing tingkat pemerintahan tersebut.

Pengeluaran konsumsi pemerintah Kabupaten mencakup konsumsi pemerintah desa, pemerintah Kabupaten, ditambah dengan konsumsi pemerintah provinsi dan pusat yang merupakan bagian dari konsumsi pemerintah Kabupaten.

Dana konsumsi pemerintah daerah bersumber dari pajak yang diambil dari masyarakat yang berarti peningkatannya berkaitan dengan kemampuan masyarakat membayar pajak.

Dalam teori ekonomi tingkat pajak akan mempengaruhi *multiplier* regional. Tingkat pajak yang tinggi akan menurunkan multiplier regional akan tetapi pajak pada akhirnya akan menjadi pengeluaran pemerintah yang tentunya akan meningkatkan pendapatan regional.

Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari pemerintah membutuhkan anggaran yang digunakan untuk keperluan belanja rutin pegawai dan keperluan pembiayaan pembangunan. Besar kecilnya pengeluaran konsumsi pemerintah dipengaruhi komponen belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal serta belanja pemerintah lainnya. Peran yang dimiliki oleh pemerintah ini digunakan terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelayanan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta. Jumlah pengeluaran pemerintah ini merupakan salah satu komponen penting PDRB.

Secara teoritis kenaikan pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan pembangunan lewat instrumen kebijakan fiskal. Instrumen ini diambil untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan kehidupan perekonomian.

Dari tahun ke tahun pengeluaran pemerintah Kabupaten Bekasi secara nominal semakin membesar ini sejalan dengan penerimaan APBD dan APBN serta pembangunan yang ada. Tabel 4.5. disajikan hasil olahan pengeluaran konsumsi pemerintah.

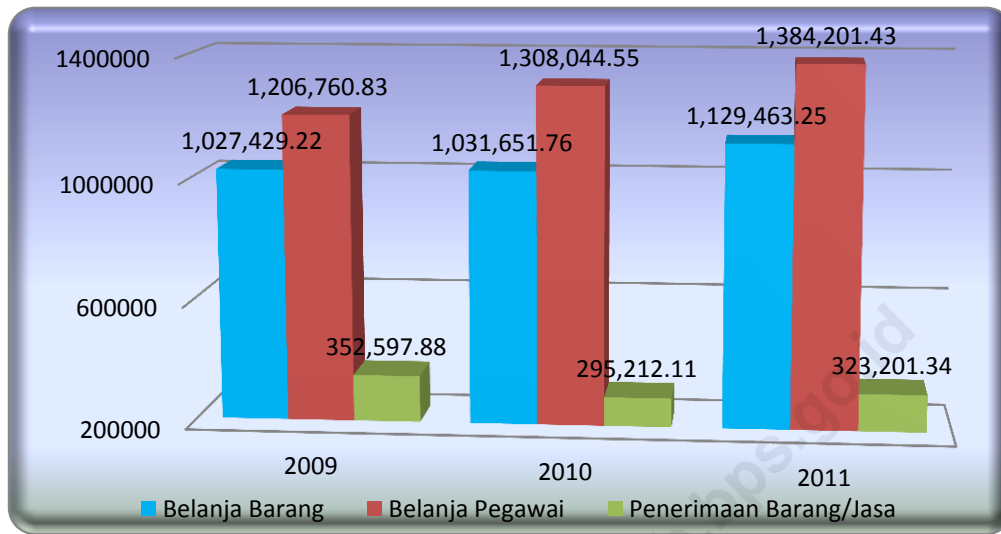
Tabel 4.5. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten Bekasi, 2009 – 2011
(Juta Rupiah)

Komponen	2009	2010*)	2011**)
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.586.787,93	2.634.908,42	2.836.866,02
a. Belanja barang	1.027.429,22	1.031.651,76	1.129.463,25
b. Belanja pegawai + penyusutan (NTB)	1.206.760,83	1.308.044,55	1.384.201,43
c. Penerimaan Barang dan jasa	352.597,88	295.212,11	323.201,34
PDRB	89.735.792,80	97.526.722,30	106.773.286,09

Dari PDRB penggunaan atas dasar harga berlaku komponen pengeluaran konsumsi pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2011 sebesar Rp. 2,8 triliun mengalami kenaikan sebesar 7,66 persen dibandingkan tahun 2010.

Kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah harga berlaku terhadap nilai PDRB hanya sebesar 2,66 persen terdiri dari 1,06 persen belanja barang, 1,30 persen belanja pegawai 0,30 belanja barang dan jasa lainnya. Upaya memperbesar kontribusi komponen ini dapat dilakukan dengan peningkatan PAD serta bantuan kegiatan dari pemerintah pusat maupun provinsi yang di Kabupaten Bekasi.

Gambar 4.3. Nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten Bekasi, 2009 – 2011



4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Untuk mendorong roda perekonomian salah satu mesin penggerakannya adalah investasi. Dalam konteks PDRB Penggunaan, investasi dikenal sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditambah dengan inventory. PMTB menggambarkan adanya proses penambahan dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu. PMTB disebut bruto karena didalamnya masih terkandung unsur penyusutan, atau nilai barang modal sebelum diperhitungkan nilai penyusutannya. PMTB adalah semua pengadaan barang modal untuk digunakan/dipakai sebagai alat yang tetap (*fixed assets*).

Sumber dana investasi dapat berasal dari tabungan domestik atau pinjaman luar negeri yang meningkatkan tingkat tabungan suatu daerah. Perkembangan lembaga keuangan juga mempengaruhi tingkat tabungan karena berhubungan dengan investor asing untuk melakukan investasi. Bagi wilayah yang memiliki tingkat tabungan domestik tidak memadai untuk menjalankan peningkatan investasi, maka alternative yang dilakukan umumnya adalah melalui pinjaman luar negeri atau mengundang investor untuk berinvestasi.

Korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dengan investasi dikenal dengan *incremental capital output ratio* (ICOR). ICOR menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi relatif akibat adanya investasi. Dengan ICOR dapat dilihat efisien penggunaan

modal yang secara signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah pada tahun tertentu.

Sejak terjadi pergeseran ekonomi dari daerah agraris menjadi industrialisasi Kabupaten Bekasi menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor ditingkat Jawa Barat maupun nasional. Sebagai daerah yang langsung berbatasan dengan ibukota Negara (DKI Jakarta) dan peralihan dari industry menjadi perdagangan dan jasa berakibat pindahnya industry yang ada di DKI kewilayah Jabotabek dan Kabupaten Bekasi menjadi sasaran pembangunan industri selama lebih dari 10 tahun terakhir ini. Berdasarkan data dari BKPM Provinsi Jawa Barat nilai investasi Kabupaten Bekasi terbesar di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2005 hingga 2010.

Untuk melihat perkembangan investasi (pmtb) dapat dilihat dari nilai PDRB dari sisi penggunaan. Dilihat dari institusi pelaku investasi (pmtb) terbagi menjadi empat yaitu : swasta, rumahtangga, BUMN dan BUMD dan pemerintah. Dengan demikian selain para investor swasta, pemerintah daerah diharapkan dapat memperbesar porsi pengeluarannya untuk barang modal. Belanja pemerintah dalam bentuk barang modal (terutama infrastruktur) menjadi stimulus yang berpengaruh bagi pembangunan ekonomi.

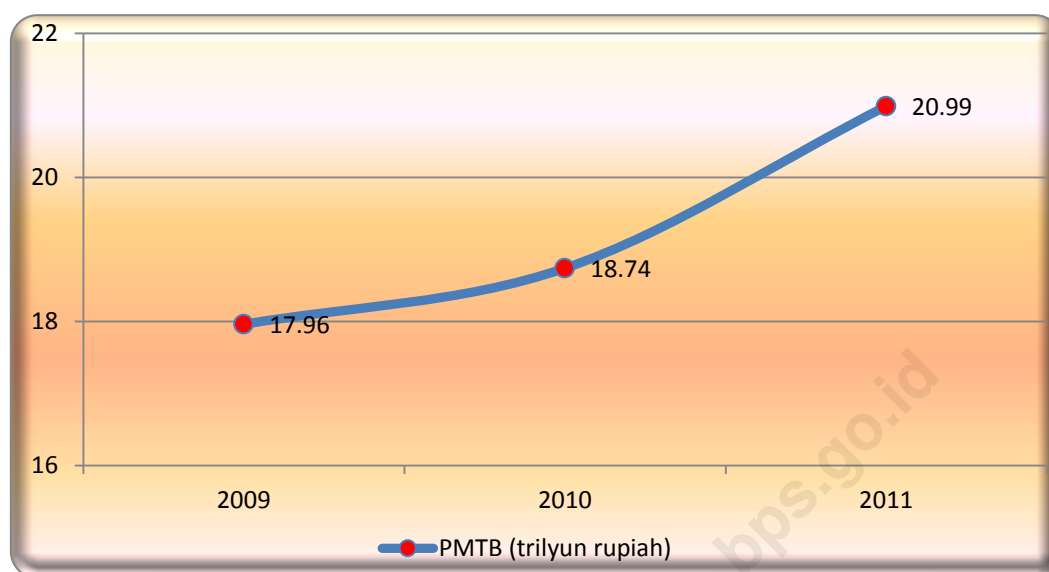
Tabel 4.6. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 – 2011 (Juta Rupiah)

Komponen	2009	2010*)	2011**)
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17.961.570,12	18.744.029,67	20.989.415,95
PDRB	89.735.792,80	97.526.722,30	106.773.286,09

**) Angka sangat sementara/termasuk estimasi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku tahun 2011 sebesar Rp. 20,90 triliun mengalami kenaikan sebesar 11,98 persen dari tahun 2010. Sementara kontribusi komponen ini terhadap PDRB mencapai 19,66 persen. Komponen PMTB ini merupakan nilai pembentukan dari PMTB bangunan, mesin dan peralatannya, ternak, Tabel 4.6. disajikan nilai PMTB Kabupaten Bekasi tahun 2009 - 2011.

Gambar 4.4. Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Bekasi, 2009 – 2011



4.5. Perubahan Stok

Data mengenai nilai perubahan stok dalam komponen PDRB masih merupakan perkiraan kasar, karena dihitung dari Selisih PDRB dengan komponen permintaan akhir lainnya Seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto. Nilai perubahan stok disajikan pada Tabel 4.7. berikut ini :

Tabel 4.7. Nilai Perubahan Stok PDRB Penggunaan Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku, 2009 – 2011 (Juta Rupiah)

Komponen	2009	2010*)	2011**)
Perubahan Stok	21.108.412,57	23.805.436,06	25.672.512,46
Distribusi terhadap PDRB (%)	23,52	24,41	24,04
PDRB	89.735.792,80	97.526.722,30	106.773.286,09

**.) Angka estimasi

Sebagai daerah industri untuk memenuhi permintaan pasar produk industri baik dalam negeri maupun luar negeri penyediaan stok dalam satu tahun atau lebih perlu diperhitungkan perusahaan sehingga adanya keseimbangan antara *demand* dan *supply* atau efisiensi proses produksi. Angka estimasi selisih antara PDRB dan komponen

permintaan akhir (perubahan stok) menunjukkan nilai sebesar Rp. 25,67 triliun ditahun 2011 dan ini memberikan peranan sebesar 24,04 persen terhadap total PDRB.

4.6. Ekspor dan Import

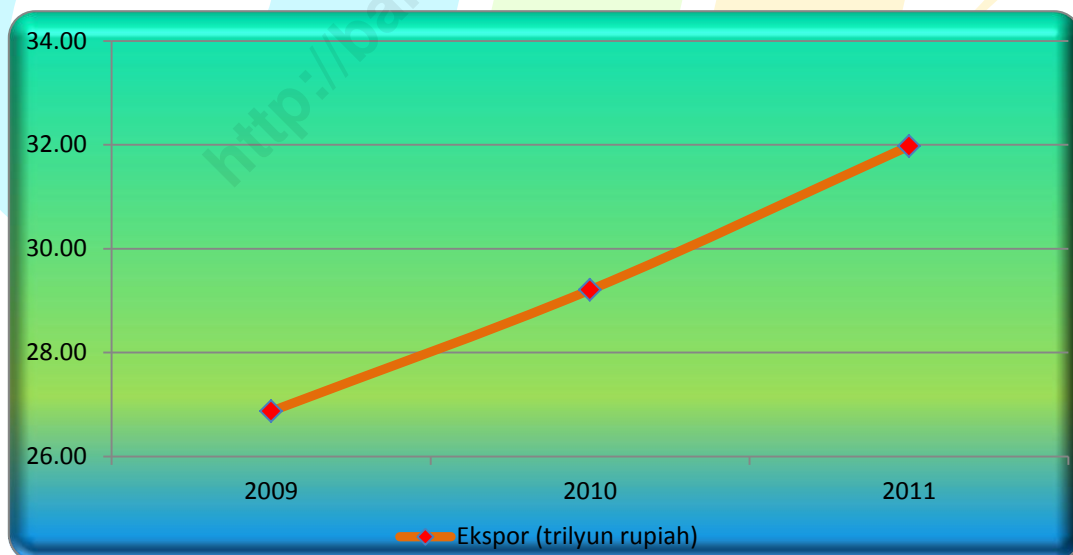
Sebagai daerah industri besar dan sedang Kabupaten Bekasi memiliki nilai ekspor dan impor yang tinggi dari tahun ketahun. Angka sangat sementara diperkirakan nilai ekspor Kabupaten Bekasi pada tahun 2011 mencapai Rp. 31,97 triliun mengalami kenaikan sebesar 9,48 persen dibandingkan tahun 2010.

Tabel 4.8. Nilai Ekspor Kabupaten Bekasi, 2009 – 2011 (Juta Rupiah)

Komponen	2009	2010*)	2011**)
Ekspor Netto	26.868.620,64	29.205.168,29	31.974.126,84
PDRB	89.735.792,80	97.526.722,30	106.773.286,09

**) Angka sangat sementara/termasuk estimasi

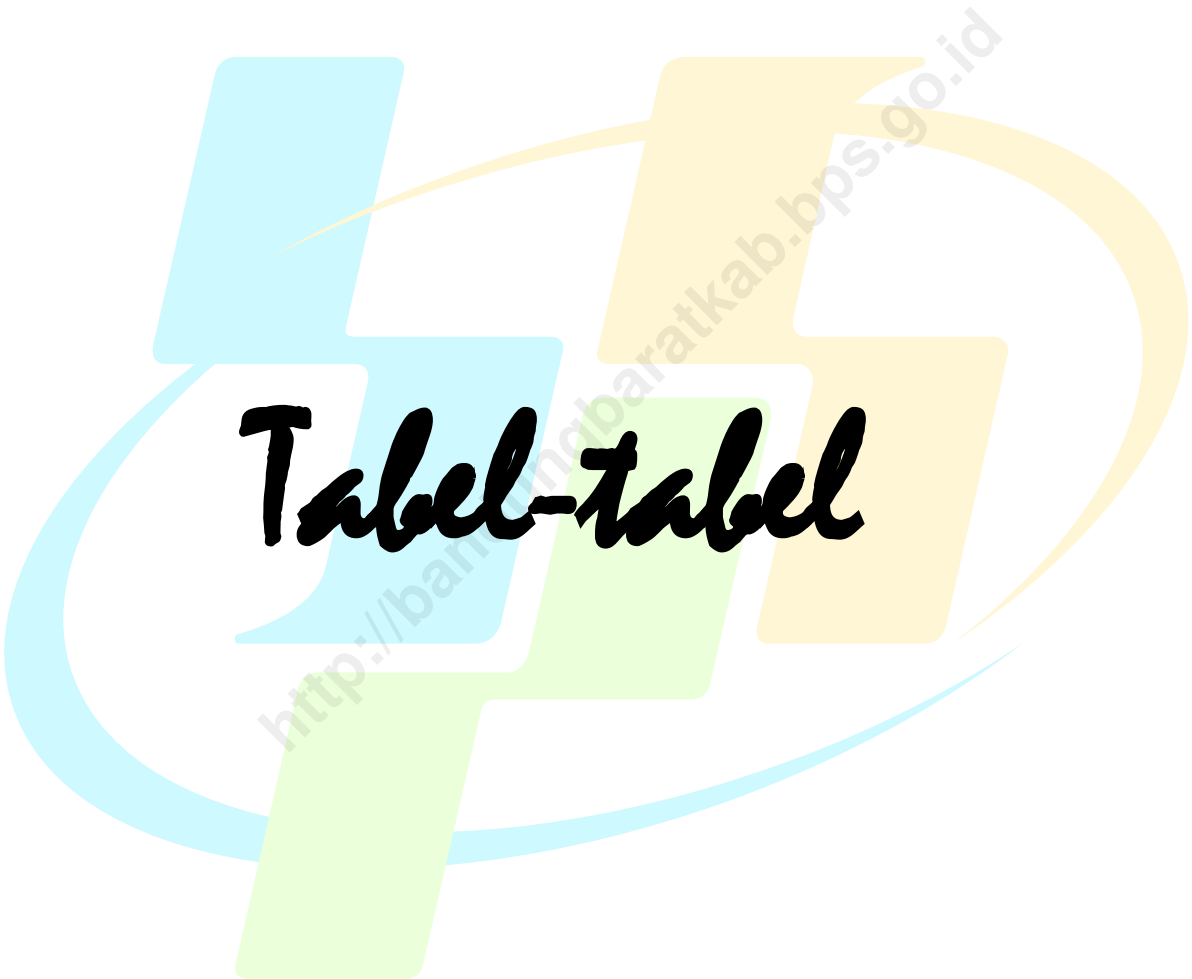
Gambar 4.5. Nilai Ekspor Kabupaten Bekasi, 2009 – 2011



Guna meningkatkan pola ekspor sehingga dapat mendorong dinamika pembangunan ekonomi di Kabupaten Bekasi secara berkesinambungan perlunya membuat kebijakan umum dan rencana strategis kedepan. diantaranya ;

1. Mendorong usaha dan mengarahkan pada sektor basis orientasi ekspor, khususnya meningkatkan mutu agar dapat bersaing dengan produk luar negeri, dengan memanfaatkan UKM yang diarahkan untuk mendukung industry yang berorientasi ekspor.
2. Mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi lokal dan mendorong industri untuk lebih banyak memakai komponen atau bahan baku lokal, serta mendorong pembangunan industry berorientasi ekspor dan industry substitusi impor.
3. Menentukan sektor dan komoditi basis yang diperkirakan dapat tumbuh cepat dan produktif.





Tabel-tabel

<http://bali.metrobaratkab.bps.go.id>

TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BEKASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2009 - 2011 (JUTA RUPIAH)

Komponen	2009	2010*)	2011**)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	21.093.749,92	23.009.504,67	25.160.584,68
• Makanan	12.211.956,53	13.364.765,23	14.595.920,35
• Non Makanan	8.881.793,39	9.644.739,44	10.564.664,33
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	116.651,61	127.675,19	139.780,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.586.787,93	2.634.908,42	2.836.866,02
a. Belanja barang	1.027.429,22	1.031.651,76	1.129.463,25
b. Belanja pegawai+penyusutan (NTB)	1.206.760,83	1.308.044,55	1.384.201,43
c. Penerimaan Barang dan jasa	352.597,88	295.212,11	323.201,34
4. Pembentukan Modal tetap Bruto	17.961.570,12	18.744.029,67	20.989.415,95
5. Perubahan Stok	21.108.412,57	23.805.436,06	25.672.512,46
6. Ekspor Netto	26.868.620,64	29.205.168,29	31.974.126,84
PDRB	89.735.792,80	97.526.722,30	106.773.286,09

*) ANGKA DIPERBAIKI

**) ANGKA SEMENTARA

TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BEKASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2009- 2011 (JUTA RUPIAH)

Komponen	2009	2010*)	2011**)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	12.814.443,24	13.598.560,11	14.429.621,92
• Makanan	7.042.507,58	7.472.804,79	7.918.844,27
• Non Makanan	5.771.935,66	6.125.755,32	6.510.777,65
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	90.979,98	96.315,23	102.315,62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.686.384,36	1.690.542,36	1.766.037,59
a. Belanja barang	558.385,45	555.245,52	589.837,06
b. Belanja pegawai+penyusutan (NTB)	775.401,03	840.084,73	862.596,84
c. Penerimaan Barang dan jasa	352.597,88	295.212,11	313.603,69
4. Pembentukan Modal tetap Bruto	8.389.412,05	8.734.216,88	9.490.069,16
5. Perubahan Stok	8.458.150,15	9.310.773,76	9.742.850,10
6. Ekspor Netto	20.350.197,37	21.558.999,10	22.902.114,90
PDRB	51.789.567,15	54.989.407,44	58.433.009,29

*) ANGKA DIPERBAIKI

**) ANGKA SEMENTARA

TABEL 3. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BEKASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2009 - 2011 (PERSEN)

Komponen	2009	2010*)	2011**)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	23,51	23,59	23,56
• Makanan	13,61	13,60	13,67
• Non Makanan	9,90	9,99	9,89
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	0,13	0,13	0,13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,88	2,70	2,66
a. Belanja barang	1,14	1,06	1,06
b. Belanja pegawai+penyusutan (NTB)	1,34	1,34	1,30
c. Penerimaan Barang dan jasa	0,39	0,30	0,30
4. Pembentukan Modal tetap Bruto	20,02	19,22	19,66
5. Perubahan Stok	23,52	24,41	24,04
6. Ekspor Netto	29,94	29,95	29,95
PDRB	100,00	100,00	100,00

*) *ANGKA DIPERBAIKI*

***) *ANGKA SEMENTARA*

TABEL 4. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BEKASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2009 - 2011 (PERSEN)

Komponen	2009	2010*)	2011**)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	24,74	24,73	24,69
• Makanan	13,60	13,59	13,55
• Non Makanan	11,14	11,14	11,14
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	0,18	0,18	0,18
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,26	3,07	3,02
a. Belanja barang	1,08	1,01	1,01
b. Belanja pegawai+penyusutan (NTB)	1,50	1,53	1,48
c. Penerimaan Barang dan jasa	0,68	0,54	0,54
4. Pembentukan Modal tetap Bruto	16,20	15,88	16,24
5. Perubahan Stok	16,33	16,93	16,67
6. Ekspor Netto	39,29	39,21	39,19
PDRB	100,00	100,00	100,00

*) *ANGKA DIPERBAIKI*

**) *ANGKA SEMENTARA*

TABEL 5. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BEKASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2009 - 2011 (PERSEN)

Komponen	2009	2010*)	2011**)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	9,29	9,08	9,35
• Makanan	9,50	9,44	9,21
• Non Makanan	9,00	8,59	9,54
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	8,45	9,45	9,48
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	36,44	1,86	7,66
a. Belanja barang	44,29	0,41	9,48
b. Belanja pegawai+penyusutan (NTB)	17,84	8,39	5,82
c. Penerimaan Barang dan jasa	120,53	-16,28	9,48
4. Pembentukan Modal tetap Bruto	24,41	4,36	11,98
5. Perubahan Stok	11,37	12,78	7,84
6. Ekspor Netto	-5,00	8,70	9,48
PDRB	8,14	8,68	9,48

*) *ANGKA DIPERBAIKI*

**) *ANGKA SEMENTARA*

TABEL 6. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BEKASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2009 - 2011 (PERSEN)

Komponen	2009	2010*)	2011**)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5,74	6,12	6,11
• Makanan	5,74	6,11	5,97
• Non Makanan	5,74	6,13	6,29
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	6,42	5,86	6,23
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	34,87	0,25	4,47
a. Belanja barang	41,16	-0,56	6,23
b. Belanja pegawai+penyusutan (NTB)	11,58	8,34	2,68
c. Penerimaan Barang dan jasa	120,53	-16,28	6,23
4. Pembentukan Modal tetap Bruto	6,14	4,11	8,65
5. Perubahan Stok	34,38	10,08	4,64
6. Ekspor Netto	-6,00	5,94	6,23
PDRB	5,04	6,18	6,26

*) *ANGKA DIPERBAIKI*

***) *ANGKA SEMENTARA*

www.bekasibaratkab.bps.go.id

DATA

Mencerdaskan Bangsa



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BEKASI

Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Kota Delta Mas
Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Telp. (021) 89970329
e-mail : bps3216@telkom.net